

Sekilas:

Program SKALA di Maluku Oktober 2024

Pengantar

Provinsi Maluku secara resmi dibentuk sebagai suatu provinsi di Indonesia pada tahun 1945 dan berada di wilayah tengah dan selatan Kepulauan Maluku. Kota Ambon, yang terletak di Pulau Ambon, merupakan ibu kota provinsi dan kota terbesar di Provinsi Maluku yang berbatasan dengan Maluku Utara, Papua Barat di sebelah timur, dan Laut Banda di sebelah selatan. Secara administratif, Provinsi Maluku terdiri dari sembilan kabupaten dan dua kota.

Provinsi Maluku berperan penting dalam perdagangan rempah-rempah dunia, khususnya dalam produksi cengkeh dan pala. Kekayaan sejarah provinsi tersebut telah berkontribusi pada warisan budaya yang beragam, termasuk pengaruh penting dari tradisi adat setempat. Wilayah provinsi ini juga merupakan habitat bagi flora dan fauna yang khas, termasuk beberapa spesies endemik. Secara umum, pertanian, perikanan, dan kehutanan merupakan penggerak

perekonomian Provinsi Maluku. Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah Maluku telah melakukan upaya bersama untuk mengembangkan ekowisata dengan memanfaatkan keindahan alam dan keanekaragaman hayati Maluku. Provinsi tersebut terus berupaya meningkatkan layanan publik, namun masih terdapat beberapa tantangan khususnya dalam memastikan kualitas layanan yang konsisten dan dapat di akses di wilayah yang lebih terpencil.

Program SKALA¹ bekerja sama dengan Pemerintah Maluku untuk memperkuat partisipasi kelompok rentan dalam perencanaan pembangunan, serta dalam meningkatkan pemanfaatan data dan analisis yang akurat, meningkatkan kapasitas fiskal daerah, dan memperkuat kualitas belanja publik. Kantor Program SKALA di Provinsi Maluku mulai beroperasi pada bulan September 2023.

Gambar 1. Data Administratif (Semua bersumber dari BPS kecuali apabila dinyatakan lain)



Jumlah Penduduk:
1.920.462 jiwa
(2024)



Luas Wilayah:
46.150,92 km²



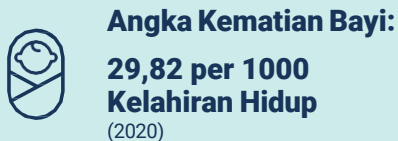
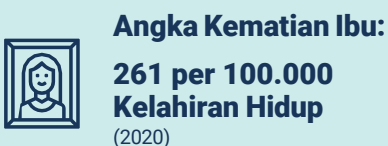
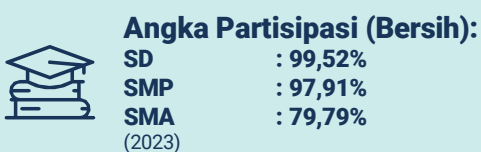
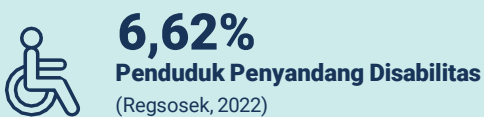
Pusat Pemerintahan
dan Ibu Kota:
Ambon



Kapasitas Keuangan Daerah:
**Rp 3,199 triliun, dengan 76,3%
berasal dari transfer fiskal daerah**
(Peraturan Daerah Maluku No. 1/2024)

1. Sinergi dan Kolaborasi untuk Akselerasi Layanan Dasar (SKALA) adalah Program Kemitraan Australia-Indonesia yang bertujuan mendukung upaya Pemerintah Indonesia untuk mengurangi kemiskinan dan kesenjangan dengan meningkatkan penyediaan layanan dasar bagi masyarakat miskin dan rentan di daerah tertinggal.

Gambar 2. Data Sosioekonomi (Berdasarkan data BPS kecuali apabila dinyatakan lain)



Pembangunan Ekonomi dan Sosial

Provinsi Maluku telah mencapai kemajuan dalam pembangunan sosial dan ekonomi yang stabil karena upayanya yang fokus pada pemanfaatan sumber daya alam dan meningkatkan layanan dasar. Pertanian, perikanan, dan kehutanan menjadi tulang punggung perekonomian Provinsi Maluku, sementara sektor-sektor yang sedang berkembang seperti pariwisata dan pertambangan telah mendukung pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Pemerintah Provinsi Maluku memiliki kebutuhan diversifikasi ekonomi dan secara aktif mempromosikan ekowisata serta industri berskala kecil untuk menciptakan kesempatan kerja yang lebih luas, khususnya bagi masyarakat pedesaan. Selain itu, provinsi tersebut memprioritaskan perbaikan infrastruktur termasuk jaringan transportasi yang lebih baik, ketersediaan listrik dan akses digital di seluruh wilayahnya. Perkembangan ini membantu mengintegrasikan masyarakat rentan ke dalam perekonomian provinsi dan mendorong Provinsi Maluku menjadi lebih terhubung dan tangguh. Untuk mendorong pelaksanaan pembangunan sosial, Pemerintah Provinsi Maluku juga berupaya memenuhi standar pelayanan minimal dalam layanan dasar seperti pendidikan dan perawatan kesehatan. Provinsi Maluku menerapkan pendekatan yang mengintegrasikan pertumbuhan ekonomi dengan pengelolaan lingkungan dan inklusi sosial guna menciptakan masa depan yang berkelanjutan dan merata bagi semua penduduknya.



Dukungan Program SKALA untuk Penyediaan Layanan Dasar yang Inklusif di Provinsi Maluku

Program SKALA mendukung pemerintah daerah dalam pemenuhan penyediaan layanan dasar. Pemerintah provinsi Maluku berperan penting dalam memfasilitasi keberhasilan pelaksanaan kegiatan yang didukung oleh Program SKALA. Pembentukan Komite Program Provinsi (*Provincial Program Committee/PPC*) yang diresmikan melalui surat Keputusan Gubernur, bertujuan untuk meningkatkan koordinasi antar instansi daerah. Program SKALA menyelaraskan Rencana Kerja Tahunan dengan prioritas pemerintah daerah sehingga dukungannya terintegrasi dengan dokumen dan inisiatif perencanaan daerah. Pendekatan ini memperkuat pencapaian prioritas pemerintah dan mendorong tata kelola yang kolaboratif berdasarkan pemahaman bersama, kemitraan, dan sinergi, yang pada akhirnya meningkatkan efektivitas pemerintah daerah.



Mempromosikan Kesetaraan Gender, Disabilitas, dan Inklusi Sosial (GEDSI)

Pemerintah Provinsi Maluku secara aktif melaksanakan berbagai inisiatif untuk meningkatkan hak dan layanan bagi perempuan dan penyandang disabilitas. Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2024 menunjukkan komitmen pemerintah provinsi dalam memenuhi hak-hak penyandang disabilitas, sementara Peraturan Daerah No. 7 Tahun 2024 memperkuat pengarusutamaan gender di seluruh provinsi. Untuk mendukung inisiatif ini, Program SKALA berkolaborasi dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Maluku, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A), Dinas Sosial Provinsi, dan Organisasi Masyarakat Sipil (OMS), termasuk kelompok advokasi disabilitas. Perwakilan dari lembaga pemerintah dan non-pemerintah secara bersama-sama telah membentuk suatu tim teknis untuk menyusun Rencana Aksi Daerah bagi Penyandang Disabilitas (RAD PD) untuk memastikan inklusi disabilitas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Maluku (2025-2029). Program SKALA juga mendorong kerja sama antara DP3A, Jaringan Masyarakat Sipil (JMS), dan parlemen daerah untuk memfasilitasi perencanaan yang responsif gender. JMS membantu mendorong pengarusutamaan gender (PUG) dengan membina hubungan dengan para pengambil kebijakan, memastikan prioritas pembahasan dan persetujuan Peraturan Daerah PUG, dan menyederhanakan proses dengan memberikan masukan yang menyeluruh dari para ahli dan pemangku kepentingan. Dengan memanfaatkan upaya ini, pemerintah Provinsi Maluku berencana untuk mengembangkan Rencana Aksi Daerah untuk Pengarusutamaan Gender.



Memanfaatkan Data dan Analitik untuk Perencanaan dan Penyediaan Layanan yang Lebih Baik

Sejalan dengan Peraturan Presiden No. 39 Tahun 2019 (Satu Data Indonesia) dan No. 95 Tahun 2018 (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)), Bappeda provinsi, Dinas Komunikasi dan Informatika, serta Badan Pusat Statistik berkolaborasi dengan Program SKALA untuk memfasilitasi data pembangunan yang akurat dan terintegrasi bagi pemerintah Provinsi Maluku. Pemerintah provinsi mengadopsi kerangka Satu Data Indonesia

untuk menyusun data sektoral dan melakukan evaluasi yang dipimpin oleh BPS melalui Evaluasi Pelaksanaan Statistik Sektoral. Program SKALA juga mendorong penggunaan platform SEPAKAT² yang memanfaatkan data REGSOSEK³ dan mencakup data kesejahteraan individu untuk penargetan program dan kebijakan pemerintah secara lebih baik. Sejak bulan September 2024, Ambon dan Maluku Tenggara telah memiliki hak akses ke platform SEPAKAT. Selain itu, sebagai bagian dari SPBE, pemerintah Provinsi Maluku juga sedang memetakan proses bisnis pemerintah daerah untuk mengurangi redundansi, memperkuat kolaborasi antardepartemen, dan mengoptimalkan fungsi administratif. Selain itu, pemerintah Provinsi Maluku menggunakan data REGSOSEK untuk mendukung perencanaan dan pengembangan kebijakan, termasuk Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) untuk Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) (2025-2045) dan analisis RAD PD.



Meningkatkan Kapasitas Fiskal

Pemerintah Provinsi Maluku terus berupaya secara aktif meningkatkan kapasitas fiskal daerah dengan mengoptimalkan pengelolaan transfer daerah dan memperkuat sistem Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pemerintah provinsi memberlakukan Peraturan Daerah No. 2/2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai peraturan pelaksanaan Undang-Undang No. 1/2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (UU HKPD). Regulasi ini mengatur prosedur yang jelas (yang ditetapkan untuk diterbitkan pada tahun 2025) untuk pemungutan pajak dan retribusi serta memungkinkan kesepakatan antara provinsi dan 11 kabupaten/kota untuk melakukan pemungutan pajak bersama. Pendekatan kolaboratif ini memungkinkan pembagian tanggung jawab dan biaya antara pemerintah provinsi dan kabupaten untuk menciptakan sistem pemungutan pajak yang kohesif. Pada tahun 2024, pemerintah daerah Maluku, yang didukung oleh Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Program SKALA menyusun peraturan teknis untuk melaksanakan peraturan pajak daerah, termasuk arahan dari para pimpinan daerah. Untuk pengelolaan transfer fiskal, pemerintah Provinsi Maluku telah memperkuat pengawasan Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH) melalui peningkatan koordinasi dengan pemerintah pusat.

2. Sistem Perencanaan Pembangunan Berbasis Data Regsosek Terpadu.
3. Registrasi Sosial Ekonomi



Meningkatkan Kualitas Belanja: Perencanaan Standar Pelayanan Minimal

Tujuan utama desentralisasi di Indonesia adalah untuk kesejahteraan rakyat, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) memberikan pedoman untuk mencapai kesejahteraan yang merata di seluruh wilayah. Pemerintah Provinsi Maluku, khususnya Sekretariat SPM, berfokus pada penguatan pendataan SPM bagi penyelenggara provinsi dan pemangku kepentingan kabupaten/kota. Pelatihan awal telah berhasil meningkatkan peringkat pelaporan SPM Provinsi Maluku ke posisi 21 dari 38 provinsi dalam sistem eSPM Kementerian Dalam Negeri. Program SKALA juga mendukung integrasi prioritas SPM ke dalam dokumen

perencanaan utama seperti Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Menengah Daerah (RPJPD dan RPJMD) serta rencana kerja pemerintah daerah agar selaras dengan tujuan nasional. Bekerja sama dengan Kemendagri, Program SKALA menyediakan pengembangan kapasitas bagi penyelenggara dan perencana di seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) di Provinsi Maluku untuk menggunakan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) Kemendagri dalam melakukan perencanaan. Selain itu, pelatihan administratif bagi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dan bendahara OPD memperkuat pemanfaatan modul administratif SIPD.

Rencana Kerja Program SKALA 2024-2025 :

TEMA	AREA FOKUS
Kesetaraan Gender, Disabilitas dan Inklusi Sosial (GEDSI)	<ul style="list-style-type: none">Memperkuat kolaborasi antara JMS dan Pemerintah Provinsi Maluku untuk Musrenbang yang Inklusif.Mengembangkan kapasitas JMS untuk mengadvokasi kelompok rentan dengan mengembangkan ringkasan kebijakan yang terkait data, GEDSI, dan SPM.Membantu Pemerintah Provinsi Maluku menetapkan model kolaborasi partisipatif dengan JMS untuk mendukung perencanaan dan penganggaran yang inklusif.
Memperkuat Data dan Analisis (D&A)	<ul style="list-style-type: none">Mendukung pelebagaan Satu Data Daerah dengan memperkuat kebijakan pelaksanaan teknis.Mengembangkan Portal Satu Data Maluku untuk mengintegrasikan sistem data dan meningkatkan efisiensi layanan di seluruh provinsi tersebut.Mempromosikan penggunaan data REGSOSEK dalam perencanaan dan penganggaran dengan meningkatkan keterampilan analisis dan penyajian data di tingkat provinsi dan kabupaten.Memperkuat penggunaan data pembangunan secara konsisten dengan memperluas platform SEPAKAT di tingkat desa.
Meningkatkan Kapasitas Fiskal Daerah	<ul style="list-style-type: none">Mendukung penyusunan peraturan dan kebijakan di bidang pajak dan retribusi daerah (PDRD).Membantu dalam membuat dan melaksanakan proses bisnis untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).Mendukung penganggaran yang inklusif melalui kontribusi pada peraturan dan dengan mengembangkan kapasitas di tingkat provinsi dan kabupaten.
Meningkatkan Kualitas Belanja Daerah (SPM)	<ul style="list-style-type: none">Mendukung fungsi koordinasi, pembinaan dan pengawasan (Korbinwas) provinsi untuk meningkatkan Indeks Pencapaian SPM melalui peningkatan kapasitas pada empat tahap pelaksanaan SPM.Berkolaborasi dengan Tim Pelaksana SPM Provinsi untuk membantu kabupaten/kota dalam menyusun peraturan SPM, rencana aksi, dan membentuk Tim Pelaksana SPM mereka sendiri.Memfasilitasi integrasi Rencana Aksi SPM ke dalam dokumen perencanaan daerah.
Tata Kelola Program (PPC)	Dukungan tata kelola program SKALA di Provinsi Maluku